

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Bangkalan adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Badan Urusan Administrasi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

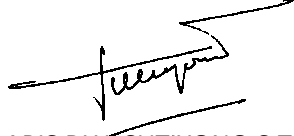
Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangkalan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Bangkalan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bangkalan, 8 Juli 2019

Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Bangkalan




H. ARIS DWT SUTİYONO, S.T., S.H

NIP. 19691216 200502 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
RINGKASAN	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	ix
NERACA.....	x
LAPORAN OPERASIONAL.....	xi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1. Dasar Hukum.....	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis	2
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	4
A.4 Basis Akuntansi.....	4
A.5 Dasar Pengukuran	4
A.6. Kebijakan Akuntansi	5
(1.) Pendapatan LRA	5
(2.) Pendapatan LO	5
(3.) Belanja	6
(4.) Beban.....	6
(5.) Aset	6
a. Aset Lancar	6
b. Aset Tetap	8
c. Penyusutan Aset Tetap	9

d. Piutang Jangka Panjang.....	10
e. Aset Lainnya	10
(6.) Kewajiban	11
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	12
B.1 Pendapatan	12
B.2 Belanja Pegawai	16
B.3 Belanja Barang.....	16
B.4 Belanja Modal.....	17
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	18
B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	18
B.4.3 Belanja Modal Jaringan	19
B.4.4 Belanja Modal Lainnya	19
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	21
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran.....	21
Terdapat selisih sebesar Rp.97,- karena tidak ada pecahan uang kecil.....	21
C.2 Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	21
C.3 Piutang Bukan Pajak	22
C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak.....	23
C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	23
C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi.....	23
(TGR).....	23
C.7 Persediaan	24
C.8 Tanah	24
C.9 Peralatan dan Mesin.....	29
C.10 Gedung dan Bangunan	29
C.11 Jalan, Irigasi dan Jaringan	30
C.12 Aset Tetap Lainnya	30
C.13 Konstruksi Dalam Pengerjaan	31

C.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31
C.15 Piutang Tagihan TP/TGR	32
C.16 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	32
C.17 Aset Tak Berwujud	33
C.18 Aset Lain-Lain	33
C.19 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	34
C.20 Utang kepada Pihak Ketiga	34
C.21 Pendapatan Diterima di Muka	35
C.22 Uang Muka dari KPPN	35
C.23 Ekuitas	35
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	41
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	41
D.2 Beban Pegawai	41
D.3 Beban Persediaan	42
D.4 Beban Barang dan Jasa	42
D.5. Beban Pemeliharaan	43
D.6 Beban Perjalanan Dinas	44
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	44
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	45
D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional	45
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	50
E.1 Ekuitas Awal	50
E.2 Defisit LO	50
E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap	50
E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	50
E.5 Koreksi Lain-lain	50
E.6 Transaksi Antar Entitas	50
E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	51

E.6.2 Transfer keluar	51
E.7Ekuitas Akhir.....	51
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	51
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	51
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	51
F.3. Pengungkapan Lain-Lain	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan.....	13
Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2019 dan TA 2018.....	14
Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2019	14
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan TA 2018.....	15
Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2019 dan TA 2018.....	16
Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan TA 2018.....	17
Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018	18
Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 dan TA 2018.....	18
Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 dan TA 2018	19
Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal JaringanTA 2019 dan TA 2018	19
Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal LainnyaTA 2019 dan TA 2018	19
Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018.....	21
Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018.....	22
Tabel 14. Rincian Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018.....	22
Tabel 15. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2019.....	23
Tabel 16. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018	23
Tabel 17. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rincian Bagian Lancar TagihanTuntutan Ganti Rugi Per 30 Juni 2019.....	24
Tabel 18. RincianPersediaan.....	24
Tabel 19. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2019	26
Tabel 20. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	32
Tabel 21. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	34
Tabel 22. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018	41
Tabel 23. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	42
Tabel 24. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018	42
Tabel 25. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018	43
Tabel 26. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018	43
Tabel 27. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018	44
Tabel 28. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018	44

Tabel 29. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 45

Tabel 30. Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018..... 45

Pengadilan Agama Bangkalan

Jl. Soekarno Hatta No.49 Bangkalan

Telp. 031-3095582 Fax. 031-3061482 e-mail : pa-bangkalan.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangkalan Semester I Tahun 2019 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 30 Juni 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangkalan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Bangkalan, 8 Juli 2019

Kuasa Pengguna Anggaran

H. Aris Dwi Sutiyono, S.T., S.H

NIP. 19691216 200502 1 001

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangkalan Semester I Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2019.

Realisasi Pendapatan Negara TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0 dari estimasi pendapatan sebesar Rp0 atau mencapai 0 persen.

Realisasi Belanja Negara TA 2019 adalah sebesar Rp.1.963.432.051 atau mencapai 51,22 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.3.833.683.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2019.

Nilai Aset per 30 Juni 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp.16.722.828.563, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.50.608.900; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.16.672.219.663; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.49.000.000 dan Rp.16.673.828.563.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.2.156.304.220 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(2.156.304.220). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.1.577.900 dan Rp0 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp(2.154.726.320).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp.16.865.122.832 dikurangi defisit-LO sebesar Rp(2.154.726.320), kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp.0 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.1.963.432.051 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2019 adalah senilai Rp.16.673.828.563.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN 30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018

URAIAN	CATATAN	TA 2019			TA 2018		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan		-	-	-	-	-	-
BELANJA							
1. Belanja Pegawai	B.2	2.825.872.000,00	1.600.676.630,00	56,64	3.058.580.000,00	1.452.808.617,00	47,50
2. Belanja Barang	B.3	970.311.000,00	362.755.421,00	37,39	865.811.000,00	337.684.913,00	39,00
3. Belanja Modal	B.4	37.500.000,00	-	-	37.500.000,00	-	-
Jumlah Belanja		3.833.683.000,00	1.963.432.051,00	51,22	3.961.891.000,00	1.790.493.530,00	45,19

NERACA

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
NERACA
PER 30 JUNI 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		30 JUNI 2019	31 DESEMBER 2018
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar	C		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1		-
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 2		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 3	49.000.000	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C. 4	-	
Piutang Bukan Pajak (Netto)		-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ga	C. 5	-	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 6	-	
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		-	
Persediaan	C. 7	1.608.900	46.000
Jumlah Aset Lancar		50.608.900	46.000
Aset Tetap			
Tanah	C. 8	10.277.875.000	10.277.875.000
Peralatan dan Mesin	C. 9	1.936.931.927	1.936.931.927
Gedung dan Bangunan	C. 10	6.519.088.000	6.519.088.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C. 11		
Aset Tetap Lainnya	C. 12	1.144.100	1.144.100
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 13		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 14	(2.062.819.364)	(1.861.041.874)
Jumlah Aset Tetap		16.672.219.663	16.873.997.153
Piutang Tagihan TP/TGR	C. 15	-	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C. 16	-	-
Tagihan TP/TGR (Netto)		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 17	-	-
Aset Lain-Lain	C. 18	10.316.750	10.316.750
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 19	(10.316.750)	(10.316.750)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		16.722.828.563	16.874.043.153
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 20	-	8.920.321
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 21	-	-
Uang Muka dari KPPN	C. 22	49.000.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		49.000.000	8.920.321
JUMLAH KEWAJIBAN		49.000.000	8.920.321
EKUITAS			
Ekuitas	C. 23	16.673.828.563	16.865.122.832
JUMLAH EKUITAS		16.673.828.563	16.865.122.832
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		16.722.828.563	16.874.043.153

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN LAPORAN OPERASIONAL 30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018

URAIAN	CATATAN	TA 2019	TA 2018
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		-	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		-	-
PENDAPATAN HIBAH		-	-
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D. 1	-	-
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	1.600.676.630	1.452.808.617
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	10.985.750	4.591.300
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	218.374.498	206.783.049
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	86.589.441	83.315.291
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	37.900.411	30.478.780
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	201.777.490	209.478.541
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	D. 8	-	-
JUMLAH BEBAN		2.156.304.220	1.987.455.578
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.156.304.220)	(1.987.455.578)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.101.800	1.972.000
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		523.900	1.644.650
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.577.900	327.350
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	1.577.900	327.350
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO		(2.154.726.320)	(1.987.128.228)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2019	30 JUNI 2018
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	16.865.122.832,00	11.995.868.146
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(2.154.726.320,00)	(4.152.137.157)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI			
EKKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-	5.255.476.007
KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3	-	5.255.476.007
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 4		-
Koreksi lain-lain	E. 5		-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 6	1.963.432.051,00	3.765.915.836
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(191.294.269,00)	4.869.254.686
EKUITAS AKHIR	E. 7	16.673.828.563,00	16.865.122.832

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar
Hukum

A.1. Dasar Hukum

6. ;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. ;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis

Rencana Strategis

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2015-2019 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2010-2014 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015-2019.

Visi Pengadilan Agama Bangkalan adalah mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung"

Misi Pengadilan Agama Bangkalan adalah :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Bangkalan melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya perkara yang diselesaikan tepat waktu.
3. Terwujudnya penurunan sisa perkara.
4. Terwujudnya peningkatan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding, Kasasi dan PK.
5. Terwujudnya peningkatan Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
6. Terwujudnya peningkatan Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
7. Terwujudnya peningkatan Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi.
8. Terwujudnya peningkatan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
9. Terwujudnya peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
10. Terwujudnya peningkatan Perkara Prodeo yang diselesaikan.
11. Terwujudnya peningkatan Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
12. Terwujudnya peningkatan Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum.
13. Terwujudnya peningkatan Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
14. Terwujudnya peningkatan Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
15. Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja).
16. Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti.
17. Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasana yang menunjang pelayanan prima.
18. Terwujudnya ketertiban admintrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti.
19. Terwujudnya peningkatan disiplin Pegawai.
20. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan /diklat secara tepat waktu.
21. Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti.

Tujuan

Terkoordinasinya pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung .

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Bangkalan adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan, diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizeble value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggal jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset lain-lain pada pos Aset lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BUMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah
 - b) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - c) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan Pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Anggaran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12(dua belas) bulan, Aset kerjasama dengan pihak ketiga (Kemitraan), dan Kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KMK.06/2015 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset tak Berwujud pada

Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi,Hak paten Sederhana,Merk,Desain Industri,Rahasia Dagang,Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten biasa,Perlindungan varietas tanaman semusim	20
Hak cipta karya seni terapan, perlindungan varietas tanaman tahunan	25
Hak cipta atas ciptaan Gol.II, Hak ekonomi pelaku pertunjukan, Hak ekonomi Produser fonogram	50
Hak cipta atas ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Bangkalan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal berupa pergeseran atau revisi POK. Hal ini dilaksanakan untuk menertibkan administrasi seperti menambah akun, menambah detail, rencana penarikan dana. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Di bulan Mei untuk belanja barang dan modal ada penambahan anggaran dari BUN. Belanja barang berupa langganan internet, sedangkan belanja modal berupa tambahan pengadaan laptop untuk hakim. Penambahan anggaran tersebut adalah program dari Mahkamah Agung untuk mendukung program E-Court. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	Tahun 2019	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain		
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	2.825.872.000	2.825.872.000
Belanja Barang	885.611.000	970.311.000
Belanja Modal	12.500.000	37.500.000
Jumlah Belanja	3.723.983.000	3.833.683.000

Realisasi

Pendapatan Rp0

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp0 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Bangkalan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	2019		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-		
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan			
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin		-	
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya		-	
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain			
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-		
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-		
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-		
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-		
Jumlah Pendapatan Bruto		-		
Pengembalian		-	-	
Jumlah Pendapatan Netto		-	-	

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 30 Juni 2019 tidak ada perubahan dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2018.

Perbandingan realisasi PNPB TA 2019 dan TA 2018 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNPB TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

KODE	Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya				
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan				
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	-	-	-
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain				
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-			
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu			-	
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu			-	
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu			-	
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji		-	-	
Jumlah Pendapatan Netto		-	-	-	

Belanja

Realisasi Belanja Pengadalan Agama Bangkalan pada periode 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.1.963.432.051 atau 51,22% dari anggaran belanja sebesar Rp3.833.683.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 30 Juni 2019 tersaji sebagai berikut:

Realisasi

Belanja

Negara

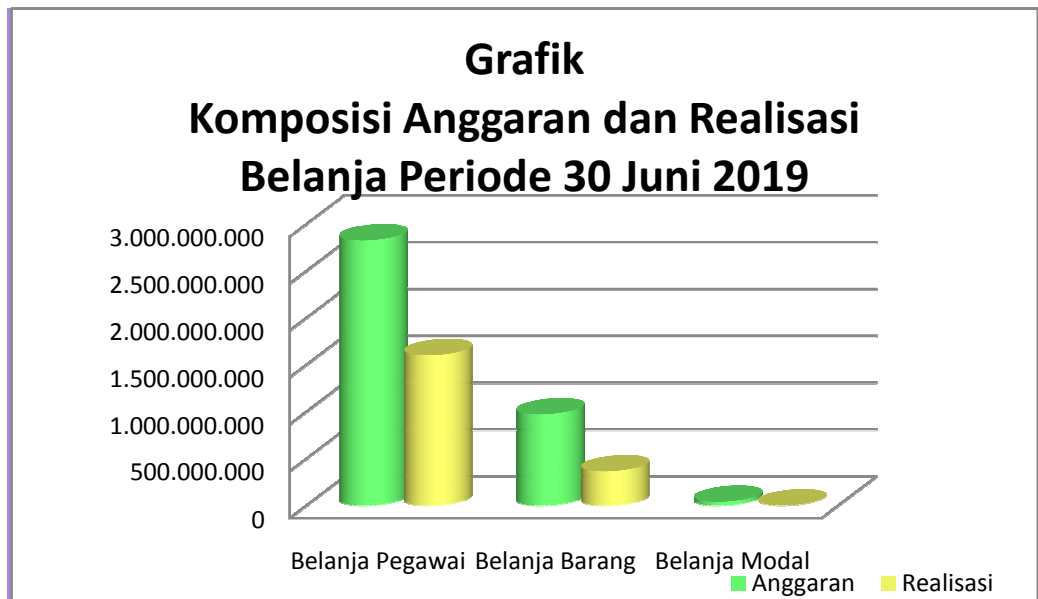
Rp.1.963.432.051

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2019

(dalam rupiah)

the 1990s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older has increased by 50 percent, and the number of people 75 years of age or older has increased by 100 percent. The number of people 85 years of age or older has increased by 200 percent. The number of people 95 years of age or older has increased by 400 percent. The number of people 100 years of age or older has increased by 1,000 percent. The number of people 105 years of age or older has increased by 2,000 percent. The number of people 110 years of age or older has increased by 4,000 percent. The number of people 115 years of age or older has increased by 8,000 percent. The number of people 120 years of age or older has increased by 16,000 percent. The number of people 125 years of age or older has increased by 32,000 percent. The number of people 130 years of age or older has increased by 64,000 percent. The number of people 135 years of age or older has increased by 128,000 percent. The number of people 140 years of age or older has increased by 256,000 percent. The number of people 145 years of age or older has increased by 512,000 percent. The number of people 150 years of age or older has increased by 1,024,000 percent. The number of people 155 years of age or older has increased by 2,048,000 percent. The number of people 160 years of age or older has increased by 4,096,000 percent. The number of people 165 years of age or older has increased by 8,192,000 percent. The number of people 170 years of age or older has increased by 16,384,000 percent. The number of people 175 years of age or older has increased by 32,768,000 percent. The number of people 180 years of age or older has increased by 65,536,000 percent. The number of people 185 years of age or older has increased by 131,072,000 percent. The number of people 190 years of age or older has increased by 262,144,000 percent. The number of people 195 years of age or older has increased by 524,288,000 percent. The number of people 200 years of age or older has increased by 1,048,576,000 percent. The number of people 205 years of age or older has increased by 2,097,152,000 percent. The number of people 210 years of age or older has increased by 4,194,304,000 percent. The number of people 215 years of age or older has increased by 8,388,608,000 percent. The number of people 220 years of age or older has increased by 16,777,216,000 percent. The number of people 225 years of age or older has increased by 33,554,432,000 percent. The number of people 230 years of age or older has increased by 67,108,864,000 percent. The number of people 235 years of age or older has increased by 134,217,728,000 percent. The number of people 240 years of age or older has increased by 268,435,456,000 percent. The number of people 245 years of age or older has increased by 536,870,912,000 percent. The number of people 250 years of age or older has increased by 1,073,741,824,000 percent. The number of people 255 years of age or older has increased by 2,147,483,648,000 percent. The number of people 260 years of age or older has increased by 4,294,967,296,000 percent. The number of people 265 years of age or older has increased by 8,589,934,592,000 percent. The number of people 270 years of age or older has increased by 17,179,869,184,000 percent. The number of people 275 years of age or older has increased by 34,359,738,368,000 percent. The number of people 280 years of age or older has increased by 68,719,476,736,000 percent. The number of people 285 years of age or older has increased by 137,438,953,472,000 percent. The number of people 290 years of age or older has increased by 274,877,906,944,000 percent. The number of people 295 years of age or older has increased by 549,755,813,888,000 percent. The number of people 300 years of age or older has increased by 1,099,511,627,776,000 percent. The number of people 305 years of age or older has increased by 2,199,023,255,552,000 percent. The number of people 310 years of age or older has increased by 4,398,046,511,104,000 percent. The number of people 315 years of age or older has increased by 8,796,093,022,208,000 percent. The number of people 320 years of age or older has increased by 17,592,186,044,416,000 percent. The number of people 325 years of age or older has increased by 35,184,372,088,832,000 percent. The number of people 330 years of age or older has increased by 70,368,744,177,664,000 percent. The number of people 335 years of age or older has increased by 140,737,488,355,328,000 percent. The number of people 340 years of age or older has increased by 281,474,976,710,656,000 percent. The number of people 345 years of age or older has increased by 562,949,953,421,312,000 percent. The number of people 350 years of age or older has increased by 1,125,899,906,842,624,000 percent. The number of people 355 years of age or older has increased by 2,251,799,813,685,248,000 percent. The number of people 360 years of age or older has increased by 4,503,599,627,370,496,000 percent. The number of people 365 years of age or older has increased by 9,007,199,254,740,992,000 percent. The number of people 370 years of age or older has increased by 18,014,398,509,481,984,000 percent. The number of people 375 years of age or older has increased by 36,028,797,018,963,968,000 percent. The number of people 380 years of age or older has increased by 72,057,594,037,927,936,000 percent. The number of people 385 years of age or older has increased by 144,115,188,075,855,872,000 percent. The number of people 390 years of age or older has increased by 288,230,376,151,711,744,000 percent. The number of people 395 years of age or older has increased by 576,460,752,303,423,488,000 percent. The number of people 400 years of age or older has increased by 1,152,921,504,606,846,976,000 percent. The number of people 405 years of age or older has increased by 2,305,843,009,213,693,952,000 percent. The number of people 410 years of age or older has increased by 4,611,686,018,427,387,904,000 percent. The number of people 415 years of age or older has increased by 9,223,372,036,854,775,808,000 percent. The number of people 420 years of age or older has increased by 18,446,744,073,709,551,616,000 percent. The number of people 425 years of age or older has increased by 36,893,488,147,419,103,232,000 percent. The number of people 430 years of age or older has increased by 73,786,976,294,838,206,464,000 percent. The number of people 435 years of age or older has increased by 147,573,952,589,676,412,928,000 percent. The number of people 440 years of age or older has increased by 295,147,905,179,352,825,856,000 percent. The number of people 445 years of age or older has increased by 590,295,810,358,705,651,712,000 percent. The number of people 450 years of age or older has increased by 1,180,591,620,717,411,303,424,000 percent. The number of people 455 years of age or older has increased by 2,361,183,241,434,822,606,848,000 percent. The number of people 460 years of age or older has increased by 4,722,366,482,869,645,213,696,000 percent. The number of people 465 years of age or older has increased by 9,444,732,965,739,290,427,392,000 percent. The number of people 470 years of age or older has increased by 18,889,465,931,478,580,854,784,000 percent. The number of people 475 years of age or older has increased by 37,778,931,862,957,161,709,568,000 percent. The number of people 480 years of age or older has increased by 75,557,863,725,914,323,419,136,000 percent. The number of people 485 years of age or older has increased by 151,115,727,451,828,646,838,272,000 percent. The number of people 490 years of age or older has increased by 302,231,454,903,657,293,676,544,000 percent. The number of people 495 years of age or older has increased by 604,462,909,807,314,587,353,088,000 percent. The number of people 500 years of age or older has increased by 1,208,925,819,614,629,174,706,176,000 percent. The number of people 505 years of age or older has increased by 2,417,851,639,229,258,349,412,352,000 percent. The number of people 510 years of age or older has increased by 4,835,703,278,458,516,698,824,704,000 percent. The number of people 515 years of age or older has increased by 9,671,406,556,917,033,397,649,408,000 percent. The number of people 520 years of age or older has increased by 19,342,813,113,834,066,795,298,816,000 percent. The number of people 525 years of age or older has increased by 38,685,626,227,668,133,590,597,632,000 percent. The number of people 530 years of age or older has increased by 77,371,252,455,336,267,181,195,264,000 percent. The number of people 535 years of age or older has increased by 154,742,504,910,672,534,362,390,528,000 percent. The number of people 540 years of age or older has increased by 309,485,009,821,345,068,724,781,056,000 percent. The number of people 545 years of age or older has increased by 618,970,019,642,690,137,449,562,112,000 percent. The number of people 550 years of age or older has increased by 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224,000 percent. The number of people 555 years of age or older has increased by 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448,000 percent. The number of people 560 years of age or older has increased by 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896,000 percent. The number of people 565 years of age or older has increased by 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792,000 percent. The number of people 570 years of age or older has increased by 19,807,040,628,566,084,398,385,

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja periode 30 Juni 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp.172.938.521 atau sebesar 9,66% dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2018. Hal ini disebabkan ada lebih banyak kegiatan di semester I tahun 2019 dibandingkan semester I tahun 2018.

Perbandingan realisasi belanja periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		TA 2019	TA 2018	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	1.600.676.630,00	1.452.808.617,00	147.868.013,00	10,18
52	Belanja Barang	362.755.421,00	337.684.913,00	25.070.508,00	7,42
53	Belanja Modal	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Netto		1.963.432.051,00	1.790.493.530,00	172.938.521,00	9,66

B.2 Belanja Pegawai

Belanja

Pegawai

Rp.1.600.676.630

Realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.1.600.676.630 dan Rp.1.452.808.617. Realisasi Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp.147.871.085 atau 10,18% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2018. Hal ini disebabkan jumlah pegawai tahun 2018 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2019. Sehingga mempengaruhi realisasi belanja pegawai.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	555.449.300,00	499.532.000,00	55.917.300,00	11,19
Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.183,00	6.075,00	3.108,00	51,16
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	47.161.930,00	43.245.680,00	3.916.250,00	9,06
Belanja Tunj. Anak PNS	14.881.494,00	13.852.394,00	1.029.100,00	7,43
Belanja Tunj. Struktural PNS	18.200.000,00	18.200.000,00	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	722.815.000,00	692.965.000,00	29.850.000,00	4,31
Belanja Tunj. PPh PNS	139.796.039,00	84.671.188,00	55.124.851,00	65,10
Belanja Tunj. Beras PNS	28.316.220,00	27.809.280,00	506.940,00	1,82
Belanja Uang Makan PNS	72.609.000,00	72.527.000,00	82.000,00	0,11
Belanja Tunjangan Umum PNS	1.440.000,00	-	1.440.000,00	-
Belanja Uang Lembur				
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)				
Realisasi Belanja Bruto	1.600.678.166,00	1.452.808.617,00	147.869.549,00	10,18
Pengembalian	1.536,00	-	1.536,00	-
Realisasi Belanja Netto	1.600.676.630,00	1.452.808.617,00	147.871.085,00	10,18

B.3 Belanja Barang

Belanja

Barang

Rp.362.755.421

Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.362.755.421 dan Rp.337.684.913. Realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp.25.070.508 atau 7,42% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2018. Hal ini disebabkan karena kegiatan di semester I tahun 2019 lebih banyak daripada semester I tahun 2018.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	169.161.556,00	157.906.177,00	11.255.379,00	7,13
Belanja Barang Non Operasional	-	10.675.000,00	(10.675.000,00)	(100,00)
Belanja Barang Persediaan	16.210.200,00	17.478.250,00	(1.268.050,00)	(7,26)
Belanja Jasa	58.133.263,00	47.013.965,00	11.119.298,00	23,65
Belanja Pemeliharaan	81.349.991,00	74.132.741,00	7.217.250,00	9,74
Belanja Perjalanan Dinas	37.900.411,00	30.478.780,00	7.421.631,00	24,35
Realisasi Belanja Bruto	362.755.421,00	337.684.913,00	25.070.508,00	7,42
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	362.755.421,00	337.684.913,00	25.070.508,00	7,42

B.4 Belanja Modal

Belanja
Modal Rp. 0

Realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2018. Hal ini disebabkan karena spesifikasi barang dari pusat mengalami keterlambatan. Sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses pengadaan.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Jaringan	-	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tidak mengalami perubahan.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	-	-	-	-
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 dan TA 2018*(dalam rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

B.4.3 Belanja Modal Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jaringan periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Belanja Modal Jaringan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2019 dan TA 2018*(dalam rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	(Rp)	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

B.4.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal Lainnya tidak mengalami perubahan.

Rincian Belanja Modal Lainnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2019 dan TA 2018*(dalam rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	(Rp)	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.49.000.000

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.49.000.000 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	30 Juni 2019	31 Desember TA 2018
1.	Uang Persediaan per 30 Juni 2019	49.000.000,00	0,00
	Jumlah	49.000.000,00	0,00

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Bangkalan per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Kuitansi yang belum di GU kan	Rp 7.223.897,00
2	Di Brankas Bendahara	Rp 41.776.200,00
3	Di rekening	Rp -
	Total	Rp 49.000.097,00
	Ls Bendahara	Rp -
	Pajak	Rp -
	Pengembalian LS Remun	Rp -
	<u>Kas di Bendahara Pengeluaran</u>	<u>Rp 49.000.097,00</u>

Terdapat selisih sebesar Rp.97,- karena tidak ada pecahan uang kecil

C.2 Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar
Dimuka (*Prepaid*)
Rp0

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0.

Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Jenis	30 Juni 2019	31 Desember 2018
		-	
JUMLAH		-	-

C.3 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan
Pajak Rp0

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan Pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir Tahun Anggaran per tanggal pelaporan.

Tabel 14. Rincian Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Jenis	30 Juni 2019	31 Desember 2018
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
JUMLAH		-	

Atas rincian Piutang Bukan Pajak diatas, jumlah yang telah disetorkan ke Kas Negara, antara lain:

No.	Uraian	Piutang PNPB	Telah disetorkan di Tahun 2019	Sisa
				-
				-
				-
				-
	JUMLAH		-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih–
Piutang Bukan
Pajak Rp0

C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 15. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2019

(dalam rupiah)

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Nihil					

Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Ganti Rugi
Rp0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar pada Pengadilan Agama Bangkalan berasal dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0. Bagian Lancar Tagihan TGR merupakan Tagihan TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel 16. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2019	31 Desember 2018
		-	
JUMLAH		-	-

C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan sebesar Rp.0,00.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Ganti Rugi (TGR)
Rp0

Tabel 17. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rincian Bagian Lancar**TagihanTuntutan Ganti Rugi Per 30 Juni 2019***(dalam rupiah)*

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
NIHIL					

C.7 Persediaan

Persediaan
Rp.1.608.900

Nilai Persediaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.1.608.900 dan Rp.46.000, terjadi kenaikan sebesar Rp.1.562.900 atau 3.397,60%.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 18. RincianPersediaan*(dalam rupiah)*

No	Uraian	31 Desember 2018	Mutasi	30 Juni 2019
1	Barang Konsumsi	46.000,00	1.562.900,00	1.608.900,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan			-
3	Persediaan lainnya			-
Jumlah		46.000,00	1.562.900,00	1.608.900,00

C.8 Tanah

Tanah
Rp.10.277.875.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Bangkalan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.10.277.875.000 dan Rp.10.277.875.000.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2018	10.277.875.000,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2019	10.277.875.000,00

Tabel 19. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2019

JENIS BMN	NUP	TANAH MILIK SENDIRI			LUAS TANAH (m2)	NILAI PEROLEHAN
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT LOKASI TANAH	KEPEMILIKAN ATAS NAMA		
Tanah Bangunan Mess/Wisma/ Asrama	1	Nomor 7, tanggal 2 Juli 2001	Jl. Soekarno Hatta No. 19 Bangkalan	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	1.200	5.117.040.000,00
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Nomor 38, tanggal 28 Desember 2010	Jl. Soekarno Hatta No.49 Bangkalan	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	2.524	5.160.835.000,00
Jumlah Halaman I						10.277.875.000,00

C.9 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin Rp.1.936.
931.927

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp.1.936.931.927 dan Rp.1.936.931.927, sehingga tidak mengalami perubahan.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2018	1.936.931.927
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	
Reklasifikasi Masuk	
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	
Transfer Masuk	
Jumlah Mutasi Tambah	-
Transfer Keluar	
Reklasifikasi Keluar	
Jumlah Mutasi Kurang	
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2019	1.936.931.927
Akumulasi Penyusutan	(1.725.525.098)
Nilai Buku	211.406.829

C.10 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp.6.519.088.00
0

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp.6.519.088.000 dan Rp.6.519.088.000.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2018	6.519.088.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2019	6.519.088.000,00
Akumulasi Penyusutan	(337.294.266,00)
Nilai Buku	6.181.793.734,00

C.11 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Jalan, Irigasi
dan Jaringan Rp
0

Saldo per 31 Desember 2018	
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2019	-
Akumulasi Penyusutan	
Nilai Buku	

C.12 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya
Rp.1.144.100

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp1.144.100 dan Rp1.144.100.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2018	1.144.100,00
Pembelian	
Jumlah Mutasi Tambah	
Transfer Keluar	
Jumlah Mutasi Kurang	
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2019	1.144.100,00
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	1.144.100,00

Konstruksi

Dalam

Pengerjaan Rp

0

C.13 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung tempat kerja yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal pelaporan, disajikan pada tabel dibawah:

Saldo per 31 Desember 2018	-
Perolehan KDP	
Pengembangan KDP	
Jumlah Mutasi Tambah	
Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi	
Jumlah Mutasi Kurang	
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2019	-

C.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp.2.062.819.364 dan Rp.1.861.041.874, terjadi kenaikan sebesar Rp.201.777.490 atau 1,19%.

Akumulasi

Penyusutan

Aset Tetap

Rp.2.062.819.36 4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2019 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 20. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.936.931.927	(1.725.525.098)	211.406.829
2	Gedung dan Bangunan	6.519.088.000	(337.294.266)	6.181.793.734
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	1.144.100	-	1.144.100
Jumlah		8.457.164.027	(2.062.819.364)	6.394.344.663

Piutang

C.15 Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan TP/TGR
Rp.0

Nilai Piutang Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada Bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan Bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara karena kelalaiannya.

Piutang Tagihan pada Pengadilan Agama Bangkalan berasal dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Rincian saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut :

No	Uraian	30 Juni 2019	31 Desember 2018
JUMLAH		-	-

Penyisihan

C.16 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR

Piutang Tidak
Tertagih -
Tagihan TP/TGR
Rp.0

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp.0 dan Rp.0.

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar Semester I Tahun 2019	Penyisihan	Nilai Penyisihan
					-
Total			-		-

C.17 Aset Tak Berwujud

Aset Tak

Berwujud Rp

0

Saldo Aset Tak Berwujud(ATB) per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai Berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2018	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2019	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

C.18 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain

Rp.10.316.750

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp10,316,750 dan Rp10.316.750.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Badan Urusan Administrasi serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2018	10.316.750,00
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2019	10.316.750,00
Akumulasi Penyusutan	(10.316.750,00)
Nilai Buku	-

Akumulasi

Penyusutan dan

Amortisasi Aset

Lainnya

Rp(10.316.750)

C.19 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp(10,316,750) dan Rp(10,316,750).

Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 30 Juni 2019 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 21. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud			-
2	Aset Lain-Lain	10.316.750,00	(10.316.750,00)	-
Jumlah		10,316,750	(10,316,750)	-

C.20 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada

Pihak Ketiga

Rp.0

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.8.920.321. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
		-	

Pendapatan

Diterima

Dimuka Rp0,00

C.21 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan sewa tanah/gedung yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	Jumlah
	NIHIL	

Uang muka dari

KPPN Rp.0

C.22 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.23 Ekuitas

Ekuitas

Rp.16.673.828.

563

Ekuitas per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.16.673.828.563 dan Rp.16.865.122.832. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNPB
Rp.0

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 22. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan PNPB Lainnya				
Pendapatan dari pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan				
1	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan			-
Jumlah Pendapatan BMN serta Pendapatan dari Penjualan		0,00	0,00	-
Pendapatan Lain-Lain				
1	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian	0,00	0,00	-
2	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,00	0,00	-
Jumlah Pendapatan Lain-Lain		0,00	0,00	-
Total		0,00	0,00	-

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp.1.600.676.630

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.1.600.676.630 dan Rp.1.452.808.617. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 23. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	555.449.300,00	499.532.000,00	11,19
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	7.647,00	6.075,00	25,88
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	47.161.930,00	43.245.680,00	9,06
4	Beban Tunj. Anak PNS	14.881.494,00	13.852.394,00	7,43
5	Beban Tunj. Struktural PNS	18.200.000,00	18.200.000,00	-
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	722.815.000,00	692.965.000,00	4,31
7	Beban Tunj. PPh PNS	139.796.039,00	84.671.188,00	65,10
8	Beban Tunj. Beras PNS	28.316.220,00	27.809.280,00	1,82
9	Beban Uang Makan PNS	72.609.000,00	72.527.000,00	0,11
10	Beban Tunjangan Umum PNS	1.440.000,00	0,00	-
11	Beban Uang Lembur	0,00	0,00	-
12	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0,00	0,00	-
Total		1.600.676.630,00	1.452.808.617,00	10,18

Beban Persediaan

Rp.10.985.750

D.3Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.10.985.750 dan Rp.4.591.300. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 24. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	10.985.750,00	4.591.300,00	139,27
2	Beban Persediaan Lainnya			
Total		10.985.750,00	4.591.300,00	139,27

Beban Barang dan

Jasa Rp.218.374.498

D.4Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.218.374.498 dan Rp..206.783.049. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 25. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	130.519.291,00	127.602.677,00	2,29
2	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	-
3	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	691.500,00	1.151.500,00	(39,95)
4	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	16.250.000,00	16.250.000,00	-
5	Beban Barang Operasional Lainnya	20.941.641,00	12.550.000,00	66,87
6	Beban Bahan	0,00	10.675.000,00	(100,00)
7	Beban Honor Output Kegiatan	0,00	0,00	0,00
8	Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	-
9	Beban Langganan Listrik	43.911.612,00	35.644.887,00	23,19
10	Beban Langganan Telepon	854.654,00	583.985,00	46,35
11	Beban Langganan Air	5.205.800,00	2.325.000,00	123,91
12	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya			
13	Beban Jasa Konsultan			
14	Beban Sewa			
15	Beban Jasa Profesi			
16	Beban Jasa Lainnya			
Total		218.374.498,00	206.783.049,00	5,61

D.5.Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp.86.589.441

Beban pemeliharaan pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.86.589.441 dan Rp.83.315.291. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	32.036.925,00	37.359.300,00	(14,25)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.775.000,00	2.318.000,00	100,00
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47.538.066,00	34.455.441,00	37,97
4	Beban Pemeliharaan Jaringan	0,00	0,00	-
5	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	5.239.450,00	9.182.550,00	(42,94)
Total		86.589.441,00	83.315.291,00	3,93

D.6Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas Rp.37.900.411

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.37.900.411 dan Rp.30.478.780. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	37.900.411,00	30.478.780,00	24,35
2	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota			
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota			
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota			
5	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri			
Total		37.900.411,00	30.478.780,00	24,35

D.7Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.201.777.490

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.201.777.490 dan Rp.209.478.541. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	89.346.068,00	97.047.119,00	(7,94)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	112.431.422,00	112.431.422,00	-
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan			
Jumlah Penyusutan		201.777.490,00	209.478.541,00	(3,68)
1	Beban Amortisasi Software			
2	Beban Amortisasi Lisensi			
Jumlah Amortisasi		0,00	0,00	-
1	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain			
Total		201.777.490,00	209.478.541,00	(3,68)

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp.0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel 29. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Beban Penyisihan Piutang PNB			
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya			
3	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR			
4	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang			
Total		-	-	#DIV/0!

D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.1.577.900

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya			
2	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara			
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL			
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL			
5	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL			
6	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	2.101.800,00	1.972.000,00	6,58
7	Beban Penyesuaian nilai Persediaan	523.900,00	1.644.650,00	(68,15)
Total		1.577.900,00	327.350,00	382,02

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp.16.865.122.83
2

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.16.865.122.832 dan Rp.11.995.868.146.

E.2 Defisit LO

Defisit LO
Rp.2.154.726.320

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah defisit sebesar Rp(2.154.726.320) dan Rp(4.152.137.157). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp.0

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.5.255.476.007.

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp.0

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp.0,00.

E.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-
lain(Rp0)

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.6 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp.1.963.432.051

Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.1.963.432.051 dan Rp.3.765.915.836. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.963.432.051,00
Diterima dari Entitas Lain	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
	1.963.432.051,00

E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2019, DDEL sebesar Rp.0 sedangkan DKEL sebesar Rp.1.963.432.051.

E.6.2 Transfer keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp.0

E.7 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir

Rp.16.673.828.563

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.16.673.828.563 dan Rp.16.865.122.832.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 30 Juni 2019 pada Pengadilan Agama Bangkalan yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 30 Juni 2019.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Pada Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 30 Juni 2019, satker Pengadilan Agama Bangkalan tidak terdapat temuan dan tindak lanjut temuan dari BPK.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangkalan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Bangkalan adalah BRI. Cabang Bangkalan A/C 0006-01-000154-30-4 a.n. BPg 036 PA Bangkalan yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp.0,-.

2. Revisi DIPA

DIPA pada Pengadilan Agama Bangkalan Tahun Anggaran 2019 bernomor : DIPA-005.01.2.401545/2019 tanggal 05 Desember 2018 berjumlah sebesar Rp.3.723.983.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. DIPA Awal

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.01		
1066.970	524111	7.200.000,00
1064.994	511111	932.182.000,00
	511119	12.000,00
	511121	80.712.000,00
	511122	25.248.000,00
	511123	33.800.000,00
	511124	1.286.935.000,00
	511125	249.977.000,00
	511126	58.606.000,00
	511129	158.400.000,00
	521111	270.610.000,00
	521114	3.600.000,00
	521115	39.000.000,00
	521119	45.882.000,00
	521811	21.436.000,00
	522111	96.000.000,00
	522112	10.008.000,00
	522113	12.000.000,00
	523111	125.080.000,00
	523119	50.390.000,00
	523121	139.880.000,00

005.01.02		
1071.951	532111	12.500.000,00
Total		3.723.983.000,00

- b. Revisi DIPA 1 (Tanggal 28 Maret 2019)
Terdapat pergeseran pagu akun 511125 dan 511151.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
005.01.01			
1066.970	524111	7.200.000,00	7.200.000,00
1064.994	511111	932.182.000,00	932.182.000,00
	511119	12.000,00	12.000,00
	511121	80.712.000,00	80.712.000,00
	511122	25.248.000,00	25.248.000,00
	511123	33.800.000,00	33.800.000,00
	511124	1.286.935.000,00	1.286.935.000,00
	511125	249.977.000,00	246.377.000,00
	511126	58.606.000,00	58.606.000,00
	511129	158.400.000,00	158.400.000,00
	511151	270.610.000,00	3.600.000,00
	521111	3.600.000,00	270.610.000,00
	521114	39.000.000,00	3.600.000,00
	521115	45.882.000,00	39.000.000,00
	521119	21.436.000,00	45.882.000,00
	521811	96.000.000,00	21.436.000,00
	522111	10.008.000,00	96.000.000,00
	522112	12.000.000,00	10.008.000,00
	522113	125.080.000,00	12.000.000,00
	523111	50.390.000,00	125.080.000,00
	523119	139.880.000,00	50.390.000,00
	523121		139.880.000,00
005.01.02			
1071.951	532111	12.500.000,00	12.500.000,00
Total			3.723.983.000,00

- c. Revisi DIPA 2 (Tanggal 29 Mei 2019)
Terdapat perubahan nilai pagu pada belanja barang dan belanja modal.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
005.01.01			
1066.970	524111	7.200.000,00	7.200.000,00
1064.994	511111	932.182.000,00	932.182.000,00

	511119	12.000,00	12.000,00
	511121	80.712.000,00	80.712.000,00
	511122	25.248.000,00	25.248.000,00
	511123	33.800.000,00	33.800.000,00
	511124	1.286.935.000,00	1.286.935.000,00
	511125	249.977.000,00	246.377.000,00
	511126	58.606.000,00	58.606.000,00
	511129	158.400.000,00	158.400.000,00
	511151	270.610.000,00	3.600.000,00
	521111	3.600.000,00	355.310.000,00
	521114	39.000.000,00	3.600.000,00
	521115	45.882.000,00	39.000.000,00
	521119	21.436.000,00	45.882.000,00
	521811	96.000.000,00	21.436.000,00
	522111	10.008.000,00	96.000.000,00
	522112	12.000.000,00	10.008.000,00
	522113	125.080.000,00	12.000.000,00
	523111	50.390.000,00	125.080.000,00
	523119	139.880.000,00	50.390.000,00
	523121		139.880.000,00
005.01.02			
1071.951	532111	12.500.000,00	37.500.000,00
Total			<u>3.833.683.000,00</u>

d. Revisi DIPA 3 (Tanggal 28 Juni 2019)

Tidak terdapat perubahan nilai pagu, hanya menyesuaikan halaman III DIPA berupa rencana penarikan dana.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Pagu (Rp)
005.01.01		
1066.970	524111	7.200.000,00
1064.994	511111	932.182.000,00
	511119	12.000,00
	511121	80.712.000,00
	511122	25.248.000,00
	511123	33.800.000,00
	511124	1.286.935.000,00
	511125	246.377.000,00
	511126	58.606.000,00
	511129	158.400.000,00
	511151	3.600.000,00

	521111	355.310.000,00
	521114	3.600.000,00
	521115	39.000.000,00
	521119	45.882.000,00
	521811	21.436.000,00
	522111	96.000.000,00
	522112	10.008.000,00
	522113	12.000.000,00
	523111	125.080.000,00
	523119	50.390.000,00
	523121	139.880.000,00
005.01.02		
1071.951	532111	37.500.000,00
Total		<u>3.833.683.000,00</u>

1. Penjelasan terkait Jurnal Bantu pada menu Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Umum aplikasi SAIBA 2019.

a. Jurnal Penyesuaian

- Pada tanggal 31 Januari 2019 merupakan jurnal balik dari penyajian jurnal akrual Tahun Anggaran Yang Lalu, berupa langganan daya dan jasa yaitu langganan listrik, langganan telepon, langganan air dan langganan internet pemakaian Desember 2018.

2. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : W13-A30/61/KU.01/01/SK/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Bangkalan dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : W13-a30/59/KU.01/01/SK/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Penguji/Penandatangan Surat Permintaan Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Staf Pengelola Keuangan Di Pengadilan Agama Bangkalan, telah menunjuk,

Kuasa Pengguna Anggaran	: Aris Dwi Sutiyono,S.T.,S.H:
Pejabat Pembuat Komitmen	: Benny Hardiyanto,S.H
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Puspita Nur Astuti,S.E
Bendahara Pengeluaran	: Fatmawati,S.H
Staf pengelola Keuangan	: 1. Purnama Kurniawan,S.H

2. Abd.Karim

3. Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : W13-a30/888/KU.01/04/SK/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Penunjukan Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Permintaan Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Staf Pengelola Keuangan Di Pengadilan Agama Bangkalan, ada perubahan pada staf pengelola keuangan sebagai berikut,

Kuasa Pengguna Anggaran	: Aris Dwi Sutiyono,S.T.,S.H:
Pejabat Pembuat Komitmen	: Benny Hardiyanto,S.H
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Puspita Nur Astuti,S.E
Bendahara Pengeluaran	: Fatmawati,S.H
Staf pengelola Keuangan	: 1. Wahyu Purna Wigati 2. AdipTohari

LAMPIRAN A.1

TABEL PENYUSUTAN SEMESTER I TA. 2019

KOD E	URAIAN	MM	KUA NTIT AS	NILAI	AK. PENYUSUTAN PER 31 Desember 2018	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PER 30 JUNI 2019	NILAI BUKU PER 30 JUNI 2019
1321 11	PERALATAN DAN MESIN		565	1.948.950.927	1.648.198.030	89.346.068	0	1.737.544.098	211.406.829
3.02. 01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	11	423.501.317	423.501.317	0	0	423.501.317	0
3.03. 02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5	1	50.000	50.000	0	0	50.000	0
3.03. 03	ALAT UKUR	5	1	2.157.000	2.157.000	0	0	2.157.000	0
3.05. 01	ALAT KANTOR	5	82	220.018.400	178.689.800	11.790.700	0	190.480.500	29.537.900
3.05. 02	ALAT RUMAH TANGGA	5	385	691.391.260	559.046.410	42.134.950	0	601.181.360	90.209.900
3.06. 01	ALAT STUDIO	5	5	32.440.600	20.441.800	1.999.800	0	22.441.600	9.999.000
3.06. 02	ALAT KOMUNIKASI	5	6	9.985.000	9.985.000	0	0	9.985.000	0
3.10. 01	KOMPUTER UNIT	4	41	461.798.548	372.029.126	22.171.255	0	394.200.381	67.598.167
3.10. 02	PERALATAN KOMPUTER	4	31	107.442.802	82.131.577	11.249.363	0	93.380.940	14.061.862
3.19. 01	PERALATAN OLAH RAGA	3	2	166.000	166.000	0	0	166.000	0

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGKALAN SEMESTER I TAHUN 2019

1331 11	GEDUNG DAN BANGUNAN		3	6.519.088.000	224.862.844	112.431.422	0	337.294.266	6.294.225.156
4.01. 01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50	2	5.401.633.000	205.458.160	62.520.044	0	267.978.204	5.133.654.796
4.01. 02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50	1	1.117.455.000	19.404.684	49.911.378	0	69.316.062	1.048.138.938
1661 12	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		1	10.316.750	10.316.750	0	0	10.316.750	0
3.10. 01	KOMPUTER UNIT	4	1	10.316.750	10.316.750	0	0	10.316.750	0
TOTAL				8.478.355.677	1.883.377.624	201.777.624	0	2.085.155.114	6.393.200.563

